

Daftar Isi Klipping Media Massa Tanggal 14 Agustus 2020

Sumber Pengambilan Dokumen

A	Kabupaten Bandung	
1	Pembangunan Pastikan Tak Ada Pengurangan Anggaran ADPD	<i>Galamedia/Hal. 3</i>

SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita : Pemkab Pastikan Tak Ada Pengurangan Anggaran ADPD

Entitas / Cakupan : Kabupaten Bandung

Sumber / Hal : Galamedia/Hal. 3

Edisi : Jumat, 14 Agustus 2020

Pemkab Pastikan Tak Ada Pengurangan Anggaran ADPD

SOREANG, (GM).-

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bandung, Drs Usman Sayogi JB., M.Si menyatakan alokasi dana pembangunan desa (ADPD) yang digulirkan dari Pemkab Bandung ke desa-desa diperkirakan akan tetap stabil. Dengan harapan pelayanan pemerintahan desa kepada masyarakat, khususnya dalam pembangunan tetap berjalan normal.

"Hal itu didukung dengan masuknya pajak yang selama ini kita pantau tetap stabil, setelah tumbuhnya kesadaran masyarakat Kab. Bandung melaksanakan kewajibannya membayar pajak. Bahkan di masa pandemi Covid-19 ini, masuknya pajak dari masyarakat melebihi dari tahun lalu. Untuk itu, kami menjamin tak ada pengurangan ADPD yang masuk ke desa-desa di Kab. Bandung," kata Yogi di Soreang, Kamis (13/8).

Meski pendapatan pajak daerah mengalami peningkatan signifikan, imbuh Yogi, hal itu berbanding terbalik dengan APBD Kab. Bandung yang terkena efisiensi dari pusat sebesar Rp 1,2 triliun. Pengurangan itu diyakini dampak pandemi Covid-19 yang belum berakhir, sehingga terjadi pengurangan anggaran pusat yang digulirkan ke daerah.

"Untuk diketahui oleh masyarakat, APBD Kab. Bandung terkena efisiensi pusat sebesar Rp 1,2 triliun. Meski begitu, tidak mengurangi semangat kita dalam membangun sebuah daerah," tuturnya.

Menurutnya, adanya efisiensi itu membuat Pemkab Bandung berusaha untuk terus memperhatikan anggaran yang digulirkan ke desa-desa. Karena pelayanan maksimal dari pemerintah kepada masyarakat, menjadi fokus perhatian.

"Kami tegaskan ADPD tidak dilakukan efisiensi (pemotongan), karena kita dari Pemkab Bandung ingin desa tetap bisa melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Pasalnya pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat jangan sampai terganggu," ungkapinya.

Aspirasi masyarakat

Ditambahkan, atas dasar aspirasi dari masyarakat wajib pajak, Pemkab Bandung melalui Bapenda memperpanjang pemberian insentif pajak daerah tahap dua pada Agustus ini sampai September 2020.

"Tahap pertama pemberian pelayanan insentif pajak daerah itu pada Mei 2020 lalu, bersamaan dengan masih diberlakukannya PSBB (pembatasan sosial berskala besar)," ujarnya.

Dijelaskan, Komisi B DPRD Kab. Bandung memberikan nota komisi diikuti dengan terbitnya Perbup Bandung No.101/2020 tentang Perubahan Atas Perbup Bandung No. 27/2020 tentang Insentif Pajak Daerah untuk Wajib Pajak Daerah Terdampak Wabah Covid-19. "Atas dasar itulah, pemberian insentif pajak diperpanjang," ucapnya.

Masih kata Kepala Bapenda, insentif pajak tahap kedua ini tidak jauh berbeda dengan tahap pertama. Bagi PBB di bawah Rp 500.000 dan tidak mempunyai tunggakan, itu digratiskan.

"Kemudian bagi PBB di atas Rp 500.000 hingga di bawah Rp 5 juta, mendapat potongan sebesar 50 persen. Artinya wajib pajak yang tidak punya tunggakan, hanya membayar setengahnya. Sementara untuk PBB di atas Rp 5 juta, dikenakan penghapusan denda dari tahun 2002 sampai 2013," bebernya.

(B.105)**